

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014-2023**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM EKONOMI SYARIAH**

**OLEH:**

**ABIL FARAJ SODIK**

**NIM. 19108010084**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MUH. RUDI NUGROHO, S.E., M.Sc.**

**NIP. 19820219 201503 1 002**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1896/Un.02/DEB/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : **PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014-2023**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABIL FARAJ SODIK  
Nomor Induk Mahasiswa : 19108010084  
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Desember 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Muh. Rudi Nugroho, S.E., M.Sc.  
SIGNED

Valid ID: 604520fce564e



Penguji I

Riswanii Budi Sekaringsih, M.Sc.  
SIGNED

Valid ID: 60437c3f13bed



Penguji II

Dr. Miftakhlul Choiri, S.Sos.I., M.S.T.  
SIGNED

Valid ID: 6043bd33141de



Yogyakarta, 17 Desember 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA.  
SIGNED

Valid ID: 6048a70a546a5

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Abil Faraj Sodik  
Lamp : -  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sunan Kalijaga  
DI-Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abil Faraj Sodik  
NIM : 19108010084  
Judul Skripsi : **Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2023**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan/Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 November 2025  
Pembimbing



Dr. Muh. Rudi Nugroho, S.E., M.Sc.  
NIP. 19820219 201503 1 002

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

### HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abil Faraj Sodik  
NIM : 19108010084  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2023”** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran hasil karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *bodynote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 November 2025  
Penyusun



Abil Faraj Sodik  
NIM. 19108010084

## HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abil Faraj Sodik  
NIM : 19108010084  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan dan pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah Saya yang berjudul:

**“Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2023”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 26 November 2025

Penyusun



Abil Faraj Sodik  
NIM. 19108010084

## HALAMAN MOTTO

**“Kokoro No Ana Wa Hoka no Min-na Ga Umete Kureru Mon-na Nda Yo.  
Jibun No. Tsuga-dori Ni Ikanaikara To Nakama No Omoi Made Sutete, Kono  
Sekai O kiramete Iru Yakko Ni, Nakama Nanka Atsumari Wa Shinai Yo.  
Sore ja, Kokoro No Ana Mo Umore Wa Shinai Nigete Nanimoshinai Yatsu Ni  
Hito Wa Nani Mau Shite Kurenaishi Na. Akiramenakya, Kanarazu Sukui Ga  
Aru”**

**“Lubang di hati akan terisi oleh orang-orang di sekitar kita. Orang-orang  
tidak akan mengitari seseorang yang membuang ingatan tentang teman-  
temannya dan menyerah pada dunia ini, hanya karena sesuatu tidak  
berjalan sesuai keinginannya. Dengan begitu, tidak ada yang mengisi lubang  
di hatimu dan orang-orang tidak akan membantu seseorang yang melarikan  
diri dan tidak melakukan apapun. Selama kau tidak menyerah, pasti akan  
selalu ada bantuan yang datang”**

— Hatake Kakashi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**“Skripsi ini Aku persembahkan spesial untuk kedua pahlawan dalam hidupku, Ibunda Suprapti serta Ayahanda Sodikin tercinta yang senantiasa berjuang untuk kebahagiaan dan kesuksesan putra-putrinya”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi/tugas akhir ini yang berjudul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2023”. Skripsi ini disusun demi memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu Program Studi Ekonomi Syariah.

Dalam kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, masukan serta dorongan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini, pihak-pihak tersebut adalah:

1. Prof. Noorhadi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga.
3. Dr. Miftakhul Choiri, S.Sos.I., M.S.I. selaku Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Muh. Rudi Nugroho, S.E., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Achmad Nurdany, S.E.I., S.E., M.E.K. yang telah menjadi mentor akademik penulis.
6. Dr. Abdul Qoyyum, S.E.I., M.Sc.Fin. dan Dr. Taosige Wau, S.E., M.Si. yang telah memberikan kelonggaran dan ketegasan dalam proses perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi S1.
7. Seluruh dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanpa terkecuali. Terimakasih atas segala ilmunya, semoga dapat bermanfaat dan berkah ilmunya.

8. Seluruh Staff TU Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan memudahkan mahasiswa dalam proses perkuliahan sampai dapat menyelesaikan Studi S1.
9. Terkhusus kedua orang tua yaitu Bapak Sodikin dan Ibu Suprapti, kedua Adik penulis yaitu Sania Malya Malikhah dan Rahma Khairunnisa yang telah menjadi inspirasi, sumber motivasi terbesar dalam hidup penulis serta telah dengan penuh keikhlasan memberikan dorongan dan do'a hingga penulis dapat menyelesaikan Studi S1. Besar harapan semoga Bapak, Ibu, dan Adik-adik penulis diberikan ketabahan hati, dilancarkan rezeki, disehatkan jiwa dan raga, dipanjangkan umur, dan dapat menyaksikan keberhasilan lainnya yang penulis raih di masa yang akan datang.
10. Keluarga besar Weleri dan Tegal yang turut memberikan dukungan dan kebahagiaan sehingga penulis termotivasi dan terus semangat dalam menyelesaikan Studi S1.
11. Teristimewa Salma Azizah Khoirunnida, S.H. yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam keadaan senang, serta memberikan ruang untuk berkeluh kesah dalam keadaan sulit sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi S1. Besar harapan semoga Sdri. Salma diberikan kebahagiaan, rasa aman dan nyaman agar kelak dapat terus bersanding dengan penulis.
12. Teman-teman terdekat penulis di perantauan yaitu Husein, Muflih, Fajrah, Ashnov, dan Lingga yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengenal dan belajar hal baru, kesempatan melakukan hal bodoh, kesempatan berhutang, dan kesempatan lain yang turut melengkapi kisah penulis.
13. Teman-teman Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang telah membantu penulis melewati dan memperjuangkan proses perkuliahan. Semoga rasa kekeluargaan kepada penulis tetap menjadi semangat dalam menjalani hidup di kemudian hari.
14. Keluarga besar KKN Kelompok 74 angkatan ke-111 yang telah membantu penulis memberikan sudut pandang lain mengenai penulisan skripsi.

15. Diri penulis sendiri yaitu Abil Faraj Sodik yang terus semangat dan berjuang dalam menyelesaikan Studi S1.

Serta semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, rasa hormat dan terimakasih atas segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Terlepas dari segala kekurangan karena kesempurnaan datangnya dari Allah SWT, semoga skripsi ini juga dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak, khususnya dalam bidang ilmu ekonomi baik konvensional maupun syariah. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 November 2025  
Penyusun



Abil Faraj Sodik  
NIM. 19108010084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. Landasan Teori .....	16
1. Desentralisasi Fiskal .....	16
2. Pertumbuhan Ekonomi .....	28
3. Kesejahteraan Masyarakat.....	42
B. Kajian Pustaka .....	52
C. Kerangka Berpikir .....	61
D. Pengembangan Hipotesis.....	62
1. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.....	62
2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat.....	63

3. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat .	63
4. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi .....	64
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>65</b>
A. Desain Penelitian .....	65
B. Definisi Operasional Variabel.....	68
1. Independen Variabel (X) Exogenous .....	69
2. Intervening Variabel (Z) .....	72
3. Dependen Variabel (Y) Endogenous .....	74
C. Populasi dan Sampel.....	78
D. Data dan Sumber Data.....	81
E. Prosedur Analisis Data .....	85
1. Spesifikasi Model .....	85
2. Identifikasi Model.....	86
3. Estimasi Model .....	87
4. Evaluasi Model Pengukuran (Measurement Model) .....	88
5. Evaluasi Model Struktural (Structural Model) .....	90
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>98</b>
A. Analisis Deskriptif.....	98
B. Analisis Tren Temporal .....	101
C. Uji Asumsi dan Kualitas.....	105
D. Confirmatory Factor Analysis (CFA) .....	109
E. Structural Equation Modeling (SEM) .....	113
F. Uji Hipotesis dan Analisis Jalur .....	116
G. Analisis Mediasi Pertumbuhan Ekonomi .....	124
H. Uji Signifikansi Efek Tidak Langsung .....	125
I. Interpretasi Hasil Analisis.....	130
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>134</b>
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran.....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>143</b>

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>173</b>
A. Data Sekunder .....	173
B. Hasil Analisis.....	190
C. Mahalonabis Distances.....	194
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>197</b>



## ABSTRAK

Studi ini membahas perdebatan seputar dampak desentralisasi fiskal terhadap manajemen ekonomi makro, khususnya pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat dari 2014-2023. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana desentralisasi fiskal secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menggunakan metodologi kuantitatif dengan *Structural Equation Modeling* (SEM) dan analisis jalur, penelitian ini memanfaatkan data panel dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Hasil menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dengan pertumbuhan ekonomi bertindak sebagai mediator parsial yang menjelaskan 84,6% dari total efek. Ini menyoroti peran penting pertumbuhan ekonomi dalam menerjemahkan desentralisasi fiskal menjadi peningkatan kesejahteraan.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat, Structural Equation Modeling, Analisis Jalur.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ***ABSTRACT***

This study discusses the debate surrounding the impact of fiscal decentralization on macroeconomic management, particularly its influence on economic growth and community welfare in West Java from 2014 to 2023. This research aims to understand how fiscal decentralization directly and indirectly affects economic growth and community welfare. Using quantitative methodology with Structural Equation Modeling (SEM) and path analysis, this study utilizes panel data from 27 districts/cities in West Java. The results show that fiscal decentralization has a positive and significant impact on economic growth and community welfare, with economic growth acting as a partial mediator that explains 84.6% of the total effect. This highlights the important role of economic growth in translating fiscal decentralization into improved welfare.

Keywords: Fiscal Decentralization, Economic Growth, Community Welfare, Structural Equation Modeling, Path Analysis.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu karakteristik desentralisasi fiskal multidimensi telah menimbulkan banyak perdebatan mengenai isu-isu manajemen makroekonomi yang membahas desentralisasi. Isu utama yang diyakini oleh beberapa ekonom adalah bahwa pengaruh desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonom lain berpendapat bahwa desentralisasi fiskal dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan, meskipun dalam prosesnya dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi (Simanjuntak, 2015a). Langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui desentralisasi fiskal telah menarik perhatian banyak ahli. (Oates, 1999a) dalam (Hardiana dkk., 2020) Banyak bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu politik, geografi, administrasi, dan ekonomi membahas hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa pemerintah pusat dianggap lebih baik dalam menyerahkan wewenang dan tugas kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya (Psycharis dkk., 2016) dalam (Christia & Ispriyarso, 2019).

Desentralisasi fiskal adalah proses pemindahan wewenang fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Fokus utama desentralisasi fiskal adalah

pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan fiskal pemerintah daerah. Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan salah satu tujuan agenda reformasi dengan memberikan otonomi seluas mungkin kepada pemerintah daerah untuk pertama kalinya pada tahun 1999, dua undang-undang disahkan, yaitu Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999) dan Undang-Undang tentang Keseimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999). Desentralisasi fiskal secara resmi dimulai pada 1 Januari 2001. Hingga saat ini, kedua peraturan tersebut telah direvisi dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keseimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan keseimbangan keuangan bertujuan untuk: (1) memberdayakan dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah; (2) menciptakan sistem keuangan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, dan akuntabel; dan (3) menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mencerminkan kewenangan masing-masing dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah (Sandjaja dkk., 2020). Tanggung jawab keuangan berada di inti desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal melibatkan dua peran: tanggung jawab pemerintah pusat sebagai pihak yang memberikan otonomi dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pihak yang menerima otonomi. Pelaksanaan desentralisasi terkait dengan transfer, distribusi, atau pembagian fungsi dan wewenang. Oleh karena itu, dukungan pendanaan yang memadai diperlukan melalui kebijakan desentralisasi fiskal (E. A. Wibowo & Oktivalerina, 2022).

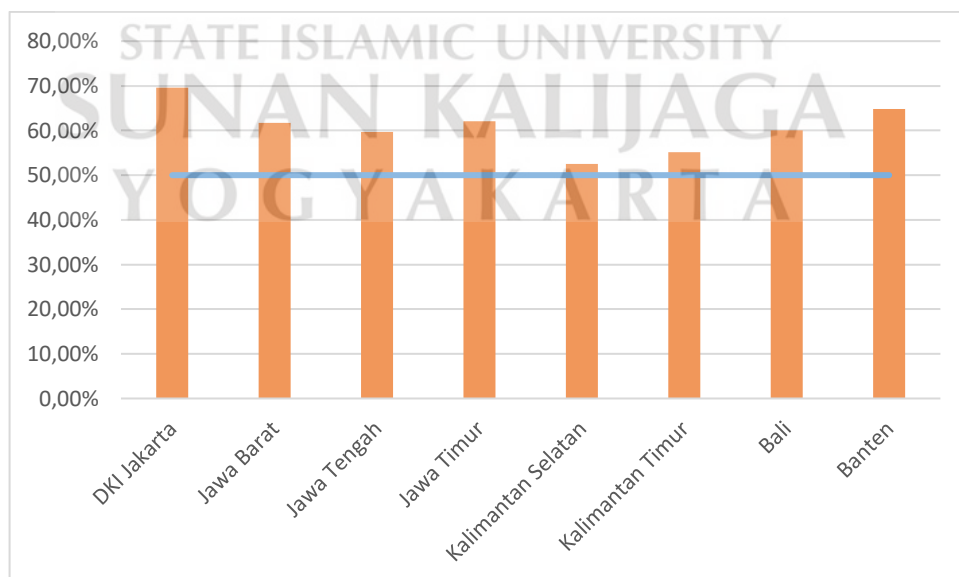
Namun, implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia awalnya bertujuan untuk menciptakan kemandirian regional. Desentralisasi fiskal sangat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas ekonomi suatu daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, daerah diberikan wewenang di semua bidang, kecuali kebijakan luar negeri, pertahanan, keamanan, keadilan, moneter, fiskal, dan urusan agama. Sumber pendanaan mengikuti otorisasi dalam bentuk transfer basis pajak dan penyediaan bantuan keuangan melalui mekanisme transfer ke daerah (Sandjaja dkk., 2020).

Transfer dana ke daerah, yang umumnya disebut Dana Balancing (transfer antar pemerintah), dibagi menjadi tiga kategori: dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana pembagian pendapatan (DBH). DAU adalah transfer dana kepada pemerintah daerah, yang berarti pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk mengalokasikan dana tersebut. Secara umum, daerah yang lebih sejahtera (dengan pendapatan pemerintah daerah yang lebih tinggi) menerima DAU yang relatif lebih kecil dibandingkan daerah yang lebih miskin (dengan pendapatan pemerintah daerah yang lebih rendah). DAK bertujuan untuk menyamakan kapasitas fiskal antar daerah guna membiayai kebutuhan masing-masing. Dana-dana ini disediakan untuk kegiatan-kegiatan spesifik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan sejalan dengan prioritas nasional untuk sektor-sektor perikanan dan kelautan, pertanian, keluarga berencana, kehutanan, infrastruktur di daerah-daerah tertinggal, fasilitas perdagangan, energi pedesaan, perumahan dan pemukiman, serta keselamatan transportasi jalan. Sementara itu, DBH bersumber

dari pendapatan anggaran negara berdasarkan persentase objek pajak untuk membiayai kebutuhan masing-masing daerah (Sandjaja dkk., 2020).

Kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran mereka sendiri menggunakan pendapatan sendiri dikenal sebagai otonomi fiskal (Hong Vo dkk., 2021). Semakin besar jumlah pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah, semakin otonom wilayah tersebut. Jika proporsi PAD terhadap pengeluaran kecil, maka wilayah tersebut dianggap secara finansial bergantung. Proporsi PAD terhadap total pengeluaran regional menunjukkan seberapa mandiri suatu wilayah. Daerah dengan PAD rendah akan menerima bantuan dari pemerintah pusat melalui dana transfer (Kharisma dkk., 2020). Gambar di bawah ini menunjukkan rata-rata proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah per provinsi di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2022.

Gambar 1.1 Rata-rata Proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Daerah 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2022



*Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2011-2022 (diolah)*

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, terdapat delapan provinsi dengan proporsi PAD di atas 50%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia masih bergantung pada transfer pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan mereka. Mengacu pada Gambar 1 di atas, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan proporsi PAD rata-rata di atas 50%, menunjukkan bahwa Jawa Barat secara finansial mampu membiayai administrasi pemerintah daerah.

Tabel 1.1 Proyeksi Penduduk

Provinsi	2010	2015	2020	2025	2030	2035
DKI Jakarta	9640.40	10177.90	10645.00	11034.00	11310.00	11459.60
Jawa Barat	43227.10	46709.60	49935.70	52785.70	55193.80	57137.30
Jawa Tengah	10688.60	11955.20	13160.50	14249.00	15201.80	16033.10
DI Yogyakarta	32443.90	33774.10	34940.10	35958.60	36751.70	37219.40
Jawa Timur	3467.50	3679.20	3882.30	4064.60	4220.20	4348.50
Banten	37565.80	38847.60	39886.30	40646.10	41077.30	41127.70
<b>Pulau Jawa</b>	<b>137033.30</b>	<b>145143.60</b>	<b>152449.90</b>	<b>158738.00</b>	<b>163754.80</b>	<b>167325.60</b>

*Sumber: Badan Pusat statistik (diolah)*

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan populasi terbesar yang terus meningkat sesuai dengan rata-rata proyeksi nasional sebesar 6,31% setiap 5 tahunnya. Karena pertumbuhannya, provinsi ini menjadi lahan uji coba yang krusial untuk memahami bagaimana desentralisasi fiskal mempengaruhi kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan akan layanan publik menjadi semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan populasi. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dana desentralisasi. Antara tahun 2014 dan 2023, Jawa Barat akan mengalami dinamika pertumbuhan ekonomi yang harus diimbangi dengan penyediaan

infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan cukup peluang kerja untuk penduduknya yang terus bertambah. Untuk menentukan sejauh mana distribusi dan penggunaan anggaran daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah padat penduduk dan dinamis ini, sangat penting untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal di provinsi ini.

Di sisi pendapatan, anggaran daerah telah secara signifikan didukung oleh transfer fiskal. Namun, hal ini tidak seharusnya menghentikan pemerintah daerah untuk mencari sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan dari sumber daya mereka sendiri. Meskipun demikian, perlu diperhatikan untuk menghindari pemungutan pajak pemerintah daerah yang berlebihan karena dapat menghambat investasi dan bisnis di daerah. Di sisi pengeluaran, peningkatan simpanan pemerintah daerah menunjukkan bahwa pengeluaran daerah tidak mencukupi. Hal ini dapat mengganggu pelayanan publik dan mengganggu kebijakan fiskal Pusat. Oleh karena itu, meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan proyek dapat menjadi salah satu cara dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas belanja daerah. Desentralisasi fiskal di Indonesia masih menjadi tantangan hingga saat ini, dengan mayoritas Kabupaten/Kota masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah (Hong Vo dkk., 2019).

Tabel 1.2 Kelompok Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah Tahun 2014-2022

Kelompok Rasio PAD	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

terhadap Penerimaan (%)									
10.0	3	4	3	2	4	3	3		1
10.0-19.9	14	13	14	9	13	14	14	15	12
20.0-30.0	5	3	4	8	3	4	4	5	6
> 30.0	5	7	6	8	7	6	6	7	8
	27	27	27	27	27	27	27	27	27

*Sumber: Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota*

*Jawa Barat, 2014-2022 (diolah)*

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, jika dilihat berdasarkan wilayah, tingkat kemandirian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih relatif rendah. Jumlah kabupaten/kota dengan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah kurang dari 10% telah berkurang dari tahun 2014 hingga 2022. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya sumber pendapatan pemerintah daerah. Rasio PAD terhadap total pendapatan pemerintah daerah dengan rata-rata tertinggi, yaitu 10,00–19,99%, mencapai 47,99%. Dengan kata lain, rasio PAD yang tinggi terhadap total pendapatan pemerintah daerah di sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut memiliki wewenang yang signifikan dalam mengelola keuangan mereka. Sebaliknya, jika rasio otonomi rendah, wilayah tersebut tetap sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai aktivitasnya.

Untuk meningkatkan efektivitas pengeluaran publik, desentralisasi fiskal dapat bermanfaat. Hipotesis ini menyarankan bahwa penyediaan barang lokal dapat lebih efisien. Ada banyak penelitian empiris yang mendukung argumen bahwa desentralisasi fiskal diperlukan, terutama untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya publik. Implementasi desentralisasi fiskal dapat meningkatkan

pendapatan dan efisiensi sektor publik, mengurangi defisit anggaran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Oates, 1993; Shapiro & Oates, 1972) dalam (Alm & Banzhaf, 2012). (Zhang & Zou, 1998) dalam (Buser, 2011) menyatakan bahwa desentralisasi pengeluaran dan pendapatan adalah cara untuk meningkatkan efisiensi sektor publik, mengurangi defisit anggaran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena pemerintah daerah akan menyediakan layanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan efisiensi ekonomi, yang pada gilirannya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Data menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Provinsi Jawa Barat pada kuartal ketiga tahun 2023 mencapai Rp80,97 triliun, naik 31,56% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp80,08 triliun, naik 42,57% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meskipun terjadi peningkatan pendapatan dan belanja, surplus anggaran mencapai Rp882,96 miliar, turun 83,57% dibandingkan dengan kuartal ketiga 2022. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan keuangan telah ditingkatkan, efisiensi dan efektivitas belanja daerah masih perlu ditingkatkan. Selain itu, analisis dana penyeimbang dan pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan bahwa kabupaten dan kota di Jawa Barat menerima lebih banyak dana penyeimbang, meningkat dari Rp11,05 triliun pada 2004 menjadi Rp26,62 triliun pada 2008. Namun, pertumbuhan PAD lebih lambat dibandingkan dana penyeimbang, menunjukkan bahwa PAD sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Situasi ini menyoroti pentingnya meningkatkan otonomi fiskal dengan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah (Rizki dkk., 2024).

Selain itu, untuk menerapkan desentralisasi fiskal, diperlukan peraturan yang jelas dan konsisten. Peraturan yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dapat memenuhi kebutuhan lokal sambil mempertahankan prinsip pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, untuk mencegah tumpang tindih dan ketidakkonsistenan kebijakan, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan dan implementasi kebijakan fiskal harus terus ditingkatkan (Sasana, 2011). Untuk menerapkan desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Barat, yang memiliki demografi dan geografi yang beragam, diperlukan pendekatan yang adaptif dan kontekstual. Untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas lokal, pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi peluang dan masalah spesifik di wilayah masing-masing. Mereka juga harus mampu merumuskan kebijakan fiskal yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Pengembangan sektor ekonomi baru, peningkatan layanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan bagian dari hal ini (P. P. Hasan, 2014).

Secara keseluruhan, desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Barat telah membawa banyak perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik (Sihombing dkk., 2024). Namun, masih banyak masalah yang perlu diatasi dan ditingkatkan, seperti ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat, kapasitas pengelolaan keuangan yang belum optimal, dan kurangnya otonomi fiskal. Dengan komitmen dan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, desentralisasi fiskal diharapkan dapat menjadi lebih efisien dan memberikan manfaat bagi lebih banyak orang di Jawa Barat.

Tabel 1.3 Kelompok Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah Tahun 2015-2022

Tahun	DAU (Miliar)	Belanja Daerah (Miliar)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	IPM
2015	49,000	60,000	5.1	69.0
2016	50,500	62,000	5.0	69.8
2017	52,000	65,000	5.3	70.4
2018	54,000	69,000	5.4	71.2
2019	56,000	72,000	5.1	71.9
2020	58,000	75,000	-2.0	72.2
2021	61,000	80,000	3.4	72.8
2022	64,000	85,000	5.2	73.5

*Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; Statistik Keuangan*

*Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Barat; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2015-2022 (diolah)*

Selama periode pengamatan, DAU Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan secara konsisten. Naik dari 49 triliun rupiah pada 2015 menjadi 64 triliun rupiah pada 2022. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung kapasitas fiskal daerah melalui transfer dana yang semakin besar. Studi yang dilakukan (I. G. Siregar, 2022) menunjukkan bahwa DAU berdampak signifikan terhadap belanja modal di Jawa Barat. Hal ini menyoroti efektivitas sistem transfer fiskal dalam mendorong pembangunan infrastruktur daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan administrasi dan pembangunan. Peningkatan DAU yang konsisten sejalan dengan kebijakan desentralisasi fiskal. Data menunjukkan bahwa DAU tumbuh rata-rata 4,2% per tahun, dengan kenaikan tertinggi sebesar 5,2% pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini kemungkinan merupakan

respon pemerintah pusat terhadap dampak ekonomi pandemi COVID-19, dan kestabilan pertumbuhan ini sangat krusial bagi keberlanjutan program pembangunan daerah. Hal ini karena DAU merupakan sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah.

Belanja daerah Provinsi Jawa Barat meningkat secara signifikan dibandingkan DAU dari 60 triliun rupiah pada 2015 menjadi 85 triliun rupiah pada 2022, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 5,1%. Peningkatan ini menunjukkan ekspansi aktivitas pemerintahan dan pembangunan yang semakin intensif di tingkat provinsi. Menurut dokumen perubahan APBD Jawa Barat 2022, total belanja daerah mencapai 34,09 triliun rupiah setelah perubahan, termasuk belanja operasi, modal, dan transfer (Barat, 2022). Dalam temuan lebih lanjut, struktur belanja daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2017-2018 dan 2021-2022, dengan pertumbuhan masing-masing 6,1% dan 6,3%. Pola ini menunjukkan siklus investasi yang kuat selama periode tertentu, mungkin karena pelaksanaan program pembangunan strategis atau penanganan kebutuhan pembangunan yang mendesak. Kapasitas belanja pemerintah daerah terutama dipengaruhi oleh transfer fiskal dari pusat, seperti yang ditunjukkan oleh korelasi yang kuat antara DAU dan belanja daerah, yang memiliki koefisien korelasi 0,99.

Perekonomian Jawa Barat tumbuh dalam pola yang bergejolak dan beragam antara tahun 2015-2022. Sebelum pandemi (2015-2019), pertumbuhan ekonomi berkisar antara 5,0% hingga 5,4%, dengan rata-rata 5,2%. Namun, guncangan ekonomi global akibat pandemi COVID-19 menyebabkan ekonomi berkontraksi sebesar -2,0% pada tahun 2020, sebelum pulih pada tahun 2021 dengan

pertumbuhan sebesar 3,4% dan menguat kembali menjadi 5,2% pada tahun 2022. Dari hasil penelitian yang dilakukan (Cindriyanti dkk., 2025; I. G. Siregar, 2022), pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang berbeda terhadap belanja modal di Jawa Barat. Temuan yang berbeda ini disebabkan oleh perbedaan metodologi dan periode analisis yang digunakan. Belanja daerah menunjukkan tren kenaikan yang konsisten meskipun pertumbuhan ekonomi bergejolak, menunjukkan bahwa komponen lain seperti DAU, memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kapasitas belanja daerah.

Antara tahun 2015 dan 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat menunjukkan peningkatan yang sangat konsisten, meningkat dari 69,0 menjadi 73,5 dengan peningkatan rata-rata 0,64 poin per tahun. Mengingat volatilitas ekonomi yang terjadi selama periode tersebut, termasuk dampak pandemi COVID-19, konsistensi peningkatan ini sangat mengesankan. Bahkan ketika ekonomi mengalami kontraksi pada tahun 2020, IPM tetap meningkat dari 71,9 menjadi 72,2, menunjukkan bahwa investasi dalam pembangunan manusia tetap berkelanjutan meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit. Alokasi belanja daerah yang konsisten untuk sektor-sektor yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, kemungkinan besar akan mendukung peningkatan IPM yang konsisten. Investasi berkelanjutan dalam sektor-sektor ini sangat penting untuk mencapai peningkatan IPM yang konsisten.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah desentralisasi fiskal berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat?
3. Apakah desentralisasi fiskal berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat?
4. Apakah desentralisasi fiskal berdampak tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berikut ini diturunkan dari permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan di atas:

1. Menyadari bagaimana desentralisasi fiskal secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
2. Menyadari bagaimana pertumbuhan ekonomi secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat
3. Menyadari bagaimana desentralisasi fiskal secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat
4. Memahami bagaimana desentralisasi fiskal mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut ini adalah keuntungan yang diantisipasi dari melakukan penelitian ini, sebagaimana ditentukan oleh rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dinyatakan:

##### **1. Manfaat Akademik**

Keuntungan yang diantisipasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi sumber dan acuan bagi para sarjana yang melakukan penelitian untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang bagaimana desentralisasi fiskal mempengaruhi kesejahteraan dan kemajuan ekonomi.

##### **2. Manfaat Praktis**

Pada kenyataannya, keuntungan yang diantisipasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan data yang tepat mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan dan kemajuan ekonomi, yang dapat membantu dalam menilai kembali pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Lima bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, masing-masing dengan pembahasan metodis:

1. Tinjauan komprehensif tentang tantangan seputar desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan diberikan dalam Bab 1, yang

dipecah menjadi empat sub-bab: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan keuntungan studi, dan diskusi sistematis.

2. Tiga sub-bab-landasan teoretis, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, dan pengembangan hipotesis-membentuk Bab 2, yang memberikan landasan teoretis. Landasan teoretis terdiri dari landasan teoretis yang menjadi dasar penyelidikan berbagai karya sastra. Pembahasan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu-isu penelitian ini dimasukkan dalam tinjauan pustaka. Pola hubungan metodis antar variabel hadir dalam kerangka berpikir. Deskripsi hubungan langsung atau tidak langsung antara variabel termasuk dalam konstruksi hipotesis.
3. desain studi, definisi operasional variabel studi, populasi dan sampel, data dan sumber data, serta proses analisis data merupakan tiga sub-bab yang membentuk Bab 3, yang mencakup metodologi penelitian.
4. Pembahasan tentang temuan analisis dan penjelasan dari setiap hasil tes yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam Bab 4.
5. Hasilnya dirangkum dalam Bab 5. Ini juga berbicara tentang kekurangan penelitian dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2023, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki peran yang sangat strategis dan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dua jalur utama, yaitu jalur langsung dan jalur tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini berhasil membuktikan keempat hipotesis yang diajukan dengan menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling* (SEM) yang menganalisis data panel dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat selama periode sepuluh tahun.

Temuan pertama menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan kuat terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien jalur sebesar 0.676 ( $p < 0.001$ ). Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat desentralisasi fiskal, yang diukur melalui rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, rasio Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap total pendapatan, rasio belanja modal terhadap total belanja, dan derajat desentralisasi fiskal, secara konsisten mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Mekanisme pengaruh ini terjadi melalui peningkatan efisiensi alokasi sumber daya yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, investasi infrastruktur produktif yang mendukung aktivitas ekonomi, dan penciptaan insentif fiskal yang mendorong

inovasi dan produktivitas daerah. Temuan ini mengkonfirmasi teori desentralisasi fiskal yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik tentang preferensi dan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dibandingkan pemerintah pusat.

Temuan kedua membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan sangat kuat terhadap kesejahteraan masyarakat dengan koefisien jalur sebesar 0.845 ( $p < 0.001$ ). Pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB per kapita, tingkat pertumbuhan PDRB, tingkat pengangguran terbuka, dan investasi per kapita, terbukti menjadi determinan yang paling kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, Gini ratio, dan angka harapan hidup. Besarnya koefisien ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif merupakan kunci utama dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme pengaruh ini bekerja melalui peningkatan pendapatan masyarakat yang berdampak pada daya beli dan akses terhadap kebutuhan dasar, penciptaan lapangan kerja yang mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk membiayai program-program kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Temuan ketiga menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal juga berpengaruh positif secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dengan koefisien jalur sebesar 0.105 ( $p < 0.001$ ), meskipun dengan magnitudo yang lebih kecil dibandingkan pengaruh tidak langsungnya melalui pertumbuhan ekonomi. Pengaruh langsung ini terjadi melalui perbaikan kualitas layanan publik yang lebih

responsif terhadap kebutuhan lokal, peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah (good governance), serta program-program kesejahteraan yang lebih tepat sasaran karena dirancang berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak hanya bekerja melalui mekanisme ekonomi (pertumbuhan ekonomi), tetapi juga melalui mekanisme non-ekonomi yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

Temuan keempat dan yang paling penting adalah bahwa pertumbuhan ekonomi memediasi sebesar 84.6% dari pengaruh total desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan jenis mediasi parsial. Dari total pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0.676, sebesar 0.571 (84.6%) merupakan pengaruh tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi, sementara 0.105 (15.4%) merupakan pengaruh langsung. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan mekanisme utama (namun bukan satu-satunya) yang menghubungkan desentralisasi fiskal dengan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya kebijakan desentralisasi fiskal yang tidak hanya fokus pada aspek administratif dan politis, tetapi juga pada aspek ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sebagai jembatan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari perspektif metodologis, penelitian ini menghasilkan model yang sangat robust dengan kualitas data yang memenuhi persyaratan analisis SEM, model pengukuran yang menunjukkan validitas dan reliabilitas yang sangat baik (semua indikator memiliki factor loading  $> 0.50$ , construct reliability  $> 0.85$ ), dan model

struktural dengan *goodness of fit* yang baik hingga sangat baik ( $\chi^2/df = 3.232$ , RMSEA = 0.091, CFI = 0.953). Hal ini memberikan keyakinan yang tinggi terhadap validitas temuan penelitian dan generalisabilitasnya untuk konteks kabupaten/kota di Jawa Barat.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan bukti empiris yang kuat bahwa desentralisasi fiskal merupakan instrumen kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat, terutama melalui perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan ini konsisten dengan teori desentralisasi fiskal, teori pertumbuhan ekonomi endogen, dan teori pembangunan manusia, serta sejalan dengan literatur empiris di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Oleh karena itu, penguatan implementasi desentralisasi fiskal dengan fokus pada peningkatan kemandirian fiskal daerah, optimalisasi belanja produktif, dan perbaikan kualitas layanan publik merupakan strategi yang tepat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang inklusif di Jawa Barat.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat direkomendasikan untuk penerapan praktis maupun pengembangan penelitian selanjutnya. Saran-saran ini ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, dan peneliti.

### **1. Saran Untuk Pemerintah Daerah**

Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat PAD merupakan indikator utama desentralisasi fiskal yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru yang potensial, memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi dan penegakan hukum yang konsisten. Namun, upaya peningkatan PAD harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat, serta diarahkan untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Kedua, optimalisasi alokasi belanja modal untuk infrastruktur produktif harus menjadi prioritas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa rasio belanja modal merupakan salah satu indikator kunci desentralisasi fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan proporsi belanja modal dalam struktur APBD, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada produktivitas ekonomi seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas pendukung usaha. Selain itu, perencanaan belanja modal harus berbasis pada analisis kebutuhan yang komprehensif dan cost-benefit analysis yang cermat, serta memastikan kualitas pelaksanaan proyek melalui pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu mengembangkan skema pembiayaan inovatif seperti Public-Private

Partnership (PPP) untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan meningkatkan efisiensi pembangunan infrastruktur.

Ketiga, penciptaan iklim investasi yang kondusif harus menjadi agenda utama pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa investasi per kapita merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yang paling berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah disarankan untuk menyederhanakan regulasi dan prosedur perizinan investasi melalui sistem online single submission (OSS), menyediakan insentif fiskal dan non-fiskal yang menarik bagi investor, mengembangkan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri yang dilengkapi dengan infrastruktur memadai, serta meningkatkan promosi potensi investasi daerah secara proaktif. Penting juga untuk memastikan bahwa investasi yang masuk memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan keterkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Keempat, perbaikan kualitas layanan publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial, harus diprioritaskan untuk memaksimalkan dampak langsung desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat. Meskipun pengaruh langsung desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan lebih kecil dibandingkan pengaruh tidak langsungnya melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik tetap sangat penting karena berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk

pendidikan dan kesehatan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, memperbaiki kualitas dan distribusi fasilitas pendidikan dan kesehatan terutama di daerah terpencil dan tertinggal, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan melalui pelatihan dan insentif yang memadai, serta mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan.

Kelima, pendekatan diferensiasi kebijakan diperlukan untuk mengakomodasi heterogenitas kapasitas fiskal dan tingkat pembangunan antar kabupaten/kota di Jawa Barat. Penelitian ini melibatkan 27 kabupaten/kota dengan karakteristik yang sangat beragam, mulai dari daerah perkotaan yang maju seperti Kota Bandung dan Kota Bekasi hingga daerah kabupaten yang masih tertinggal. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat disarankan untuk mengembangkan tipologi daerah berdasarkan kapasitas fiskal dan tingkat pembangunan, merancang kebijakan dan program yang sesuai dengan karakteristik masing-masing tipologi, memberikan dukungan khusus (technical assistance dan fiscal assistance) kepada daerah dengan kapasitas fiskal rendah, serta mendorong kerjasama antar daerah untuk mengatasi kesenjangan dan memanfaatkan ekonomi aglomerasi.

## 2. Saran Untuk Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat disarankan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan formula Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar lebih mendorong kemandirian fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi yang

inklusif. Meskipun DAU terbukti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terdapat kekhawatiran bahwa ketergantungan yang terlalu tinggi pada transfer pusat dapat mengurangi insentif daerah untuk meningkatkan PAD. Oleh karena itu, formula DAU perlu dirancang dengan mekanisme reward and punishment yang mendorong daerah untuk meningkatkan kinerja fiskal dan pembangunan. Selain itu, pemerintah pusat perlu memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan sistem informasi yang terintegrasi. Pengawasan terhadap penggunaan dana transfer juga perlu diperkuat untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah penyimpangan.

### 3. Saran Untuk Penelitian selanjutnya

Dari perspektif akademis, penelitian ini membuka beberapa peluang untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian mendatang dapat memperluas cakupan geografis ke provinsi-provinsi lain di Indonesia atau melakukan studi komparatif antar provinsi untuk mengidentifikasi pola-pola yang konsisten dan variasi kontekstual. Kedua, penelitian dapat memperpanjang periode observasi atau menggunakan data yang lebih terkini untuk menangkap dinamika jangka panjang dan dampak kebijakan-kebijakan baru dalam desentralisasi fiskal. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi variabel moderator atau mediator tambahan yang dapat memperkaya pemahaman tentang mekanisme pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan, seperti kualitas governance, kapasitas institusional, partisipasi masyarakat, atau faktor geografis dan demografis. Keempat, penelitian dapat

menggunakan pendekatan metodologi alternatif seperti difference-in-differences, regression discontinuity design, atau metode eksperimental untuk mengidentifikasi hubungan kausal yang lebih kuat. Kelima, penelitian dapat mengeksplorasi dimensi kualitas pertumbuhan ekonomi (inklusivitas, keberlanjutan lingkungan) dan dimensi kesejahteraan yang lebih luas (kesejahteraan subjektif, kebebasan, keamanan) untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak desentralisasi fiskal.

Secara keseluruhan, implementasi saran-saran di atas diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang inklusif di Provinsi Jawa Barat khususnya, dan di Indonesia pada umumnya. Komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, disertai dengan koordinasi yang baik antar tingkat pemerintahan dan partisipasi aktif masyarakat, merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan tujuan tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D. (2009). *Introduction to Modern Economic Growth*. Princeton University Press.  
[http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/8436/1/29%20.%20Daron\\_Acemoglu.pdf#](http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/8436/1/29%20.%20Daron_Acemoglu.pdf#)
- Acemoglu, D., & Johnson, S. (2007). Disease and Development: The Effect of Life Expectancy on Economic Growth. *Journal of Political Economy*, 115(6), 925–985. <https://doi.org/10.1086/529000>
- Aguinis, H., Gottfredson, R. K., & Joo, H. (2013). Best-Practice Recommendations for Defining, Identifying, and Handling Outliers. *Organizational Research Methods*, 16(2), 270–301. <https://doi.org/10.1177/1094428112470848>
- Ahmad, E., Brosio, G., & Pöschl, C. (2015). Local Property Taxation and Benefits in Developing Countries: Overcoming Political Resistance? Dalam E. Ahmad & G. Brosio (Ed.), *Handbook of Multilevel Finance*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9780857932297.00022>
- Akai, N., & Sakata, M. (2002). Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence from State-level Cross-section Data For the United States. *Journal of Urban Economics*, 52(1), 93–108. [https://doi.org/10.1016/S0094-1190\(02\)00018-9](https://doi.org/10.1016/S0094-1190(02)00018-9)
- Akaike, H. (1974). A New Look at the Statistical Model Identification. *IEEE Transaction on Automatic Control*, 19, 716–723. [https://doi.org/doi.org/10.1007/978-1-4612-1694-0\\_16](https://doi.org/doi.org/10.1007/978-1-4612-1694-0_16)

- Alkire, S., & Santos, M. E. (2014). Measuring Acute Poverty in the Developing World: Robustness and Scope of the Multidimensional Poverty Index. *World Development*, 59, 251–274. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.026>
- Alm, J., & Banzhaf, H. S. (2012). Designing Economic Instruments for The Environment in a Decentralized Fiscal System. *Journal of Economic Surveys*, 26(2), 177–202. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2010.00632.x>
- Alvaro, R. (2022). Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Daerah Tertinggal. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 7(2), 256–276. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i2.132>
- Alwin, D. F., & Hauser, R. M. (1975). The Decomposition of Effects in Path Analysis. *American Sociological Review*, 40(1), 37. <https://doi.org/10.2307/2094445>
- Arbuckle, J. L. (2017). *IBM SPSS Amos 25 User's Guide*. IBM Corporation. [https://www.ibm.com/docs/en/SSLVMB\\_25.0.0/pdf/amos/IBM\\_SPSS\\_Amos\\_User\\_Guide.pdf](https://www.ibm.com/docs/en/SSLVMB_25.0.0/pdf/amos/IBM_SPSS_Amos_User_Guide.pdf)
- Arcalean, C., Glomm, G., Schiopu, I., & Suedekum, J. (2010). Public budget composition, fiscal (de)centralization, and welfare. *Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne d'économique*, 43(3), 832–859. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5982.2010.01597.x>

- Arini Sita, P. R. (2016). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau Kalimantan. *Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana*, 2(2). <https://doi.org/10.26486/jramb.v2i2.284>
- Aruan, N. I. M., Hutagalung, I., & Purba, B. (2023). Analisis Dampak Teori Keynes Dalam Mengatasi Krisi Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.62017/jimea.v1i1.78>
- Aschauer, D. A. (1989). Is Public Expenditure Productive? *Journal of Monetary Economics*, 23(2), 177–200. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(89\)90047-0](https://doi.org/10.1016/0304-3932(89)90047-0)
- Atkinson, A. B. (2016). [Rev. of *Inequality: What Can Be Done?*, oleh C. Fourie]. *Harvard University Press*, 32(2), 1–7. <https://doi.org/10.1017/S0266267116000067>
- Bahl, R. (1999). *Implementation Rules for Fiscal Decentralization* (International Studies Program Working Paper No. Working Paper 99-1; hlm. 1–30). Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University. <https://icepp.gsu.edu/files/2015/03/ispwp9901.pdf>
- Bahl, R., & Martinez-Vazquez, J. (2006). Fiscal Federalism and Economic Reform in China. Dalam J. Wallack & T. N. Srinivasan (Ed.), *Federalism and Economic Reform* (1 ed., hlm. 249–300). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511511004.006>
- Bahl, R. W., & Linn, J. F. (1992). *Urban Public Finance in Developing Countries*. Oxford University Press, Inc.

<https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/963911468739534803/urban-public-finance-in-developing-countries>

Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2019). *Good Economics for Hard Times* (First edition). PublicAffairs.

<https://gdsnet.org/BanerjeeandDufloGoodEconomicsforHardtimes2019.pdf>

Barat, P. D. P. J. (2022). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022*.

<https://ppid.jabarprov.go.id/assets/downloads/DIK/Perdaprov%20Jabar%20No.8%20Tahun%202022%20-%20Perubahan%20APBD%20Tahun%202022.pdf>

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173–1182. <https://doi.org/doi.org/10.1037//0022-3514.51.6.1173>

Barr, N. (1998). *The Economics of the Welfare State* (3rd ed). Stanford University Press.

[http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/13291/1/22%20.%20Nicholas\\_Barr.pdf](http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/13291/1/22%20.%20Nicholas_Barr.pdf)

- Barrett, P. (2007). Structural equation modelling: Adjudging model fit. *Personality and Individual Differences*, 42(5), 815–824.  
<https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.09.018>
- Barro, R. J. (1991). Economic Growth in Cross Section of Countries. *The Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 407–443. <https://doi.org/10.2307/2937943>
- Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (2004). *Economic growth* (2nd ed). MIT Press.
- Baskaran, T. (2016). Fiscal federalism, decentralization, and economic growth: A meta-analysis. *Economic Inquiry*, 54(3), 1445–1463.  
<https://doi.org/10.1111/ecin.12331>
- Bentham, J. (1780). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*.  
<http://www.koeblergerhard.de/Fontes/BenthamJeremyMoralsandLegislation1789.pdf#page=43>
- Bentler, P. M. (1990). Quantitative Methods in Psychology: Comparative Fit Indexes in Structural Models. *Psychological Bulletin*, 107(2), 238–246.  
<https://doi.org/doi/10.1037/0033-2909.107.2.238>
- Bentler, P. M., & Bonett, D. G. (1980). Significance Tests and Goodness of Fit in the Analysis of Covariance Structures. *Psychological Bulletin*, 88(3), 588–606. <https://doi.org/doi/10.1037/0033-2909.88.3.588>
- Bentler, P. M., & Chou, C.-P. (1987). Practical Issues in Structural Modeling. *Sociological, Methods & Research*, 16(1), 78–117.  
<https://doi.org/10.1177/0049124187016001004>

- Bhakti, N. A., Istiqomah, & Suprpto. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 18(4), 452–469.
- Bird, R. M. (1993). Threading The Fiscal Labyrinth: Some Issues in Fiscal Decentralization. *National Tax Journal*, 46(2), 207–227.  
<https://doi.org/doi:10.1086/ntj41789011>
- Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (Ed.). (1998). *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Cambridge University Press.  
<https://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam032/98020491.pdf>
- Bird, R. M., & Wallich, C. (1993). *Fiscal Decentralization and Intergovernmental Relations in Transition Economics: Toward a Systematic Framework of Analysis* (Policy Research Working Paper No. WPS1122; Research Working Papers ; No. WPS 1122. Public Economics, hlm. 1–87). World Bank Group.  
<https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/311571468739162484/fiscal-decentralization-and-intergovernmental-relations-in-transition-economics-toward-a-systematic-framework-of-analysis>
- Bollen, K. A. (1989a). A New Incremental Fit Index for General Structural Equation Models. *Sociological Methods & Research*, 17(3), 303–316.  
<https://doi.org/10.1177/0049124189017003004>
- Bollen, K. A. (1989b). *Structural Equations With Latent Variables*. John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781118619179>

- Bollen, K. A., & Noble, M. D. (2011). Structural Equation Models and the Quantification of Behavior. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *108*(3), 15639–15646. <https://doi.org/10.1073/pnas.1010661108>
- Bonet, J. (2006). Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence from The Colombian Experience. *The Annals of Regional Science*, *40*(3), 661–676. <https://doi.org/10.1007/s00168-006-0060-z>
- Browne, M. W., & Cudeck, R. (1992). Alternative Ways of Assessing Model Fit. *Sociological Methods & Research*, *21*(2), 230–258. <https://doi.org/10.1177/0049124192021002005>
- Burns, J. H. (2005). Happiness and Utility: Jeremy Bentham’s Equation. *Utilitas*, *17*(1), 46–61. <https://doi.org/10.1017/S0953820804001396>
- Buser, W. (2011). The impact of fiscal decentralization on economics performance in high-income OECD nations: An institutional approach. *Public Choice*, *149*(1), 31–48. <https://doi.org/10.1007/s11127-011-9827-6>
- Byrne, B. M. (2016). *Structural Equation Modeling With AMOS: Basic Concepts, Applications, and Programming* (2nd ed.). Routledge. [https://www.researchgate.net/publication/361909378\\_Structural\\_Equation\\_Modeling\\_With\\_AMOS](https://www.researchgate.net/publication/361909378_Structural_Equation_Modeling_With_AMOS)
- Carrion-i-Silvestre, J. L., Espasa, M., & Mora, T. (2008). Fiscal Decentralization and Economic Growth in Spain. *Public Finance Review*, *36*(2), 194–218. <https://doi.org/10.1177/1091142107304649>
- Chen, F., Bollen, K. A., Paxton, P., Curran, P. J., & Kirby, J. B. (2001). Improper Solutions in Structural Equation Models: Causes, Consequences, and

- Strategies. *Sociological Methods & Research*, 29(4), 468–508.  
<https://doi.org/10.1177/0049124101029004003>
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149.  
<https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Cindriyanti, Hambani, S., & Anwar, S. (2025). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Arastirma*, 5(1), 1–14.  
<https://doi.org/10.32493/jaras.v5i1.39670>
- Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2nd ed.). Psychology Press.  
<https://utstat.utoronto.ca/~brunner/oldclass/378f16/readings/CohenPower.pdf>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5 ed.). Sage Publications.  
[https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/510378/mod\\_resource/content/1/creswell.pdf](https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/510378/mod_resource/content/1/creswell.pdf)
- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the Internal Structure of Tests. *Psychometrika*, 16(3), 297–334.  
<https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/BF02310555>
- Davoodi, H., & Zou, H. (1998). Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study. *Journal of Urban Economics*, 43(2), 244–257.  
<https://doi.org/10.1006/juec.1997.2042>

- Delen, D. N., & Susilo, P. (2019). Has Fiscal Decentralization Succeeded in Increasing Quality Economic Growth in East Java? *Jurnal Bina Praja*, 11(1), 15–29. <https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.15-29>
- Devarajan, S., Swaroop, V., & Zou, H. (1996). The composition of public expenditure and economic growth. *Journal of Monetary Economics*, 37(2), 313–344. [https://doi.org/10.1016/S0304-3932\(96\)90039-2](https://doi.org/10.1016/S0304-3932(96)90039-2).
- Diaz-Serrano, L., & Meix-Llop, E. (2019). Decentralization and the quality of public services: Cross-country evidence from educational data. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 37(7), 1296–1316. <https://doi.org/10.1177/2399654418824602>
- Diaz-Serrano, L., & Rodríguez-Pose, A. (2015). Decentralization and the Welfare State: What Do Citizens Perceive? *Social Indicators Research*, 120(2), 411–435. <https://doi.org/10.1007/s11205-014-0599-5>
- Domar, E. D. (1946). Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment. *Econometrica*, 14(2), 137. <https://doi.org/10.2307/1905364>
- Ezcurra, R., & Pascual, P. (2008). Fiscal Decentralization and Regional Disparities: Evidence from Several European Union Countries. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 40(5), 1185–1201. <https://doi.org/10.1068/a39195>
- Faridi, M. Z. (2011). Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth: Evidence from Pakistan. *Pakistan Journal of Social Science*, 31(1), 1–13.
- Feltenstein, A., & Iwata, S. (2005). Decentralization and Macroeconomic Performance in China: Regional Autonomy has its Costs. *Journal of*

*Development Economics*, 76(2), 481–501.  
<https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2004.01.004>

Field, A. (2018). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics* (5th ed.). Sage Publications.

Filho, W. L., Azul, A. M., Brandli, L., Lange Salvia, A., & Wall, T. (Ed.). (2021). *Decent Work and Economic Growth*. Springer International Publishing.  
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-95867-5>

Filippetti, A., & Sacchi, A. (2016). Decentralization and economic growth reconsidered: The role of regional authority. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 34(8), 1793–1824.  
<https://doi.org/10.1177/0263774X16642230>

Flatters, F., Henderson, V., & Mieszkowski, P. (1974). Public Goods, Efficiency, and Regional Fiscal Equalization. *Journal of Public Economics*, 3(2), 99–112. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(74\)90028-0](https://doi.org/10.1016/0047-2727(74)90028-0)

Fleurbaey, M. (2015). Beyond Income and Wealth. *Review of Income and Wealth*, 61(2), 199–219. <https://doi.org/10.1111/roiw.12187>

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39. <https://doi.org/10.2307/3151312>

Gong, L. (2003). Fiscal Federalism, Public Capital Formation, and Endogenous Growth. *Annals of Economics and Finance*, 4(2), 471–490.

Goodin, R. E., Headey, B., Muffles, R., & Dirven, H.-J. (1999). *The Real Worlds of Welfare Capitalism*. Cambridge University Press.

- Gramlich, E. M. (1993). A Policymaker's Guide to Fiscal Decentralization. *National Tax Journal*, 46(2), 229–235.  
<https://doi.org/doi:10.1086/ntj41789012>
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24.  
<https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Hair Jr., J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2013). *Multivariate Data Analysis* (7th ed.). Pearson.  
<https://www.drnishikantjha.com/papersCollection/Multivariate%20Data%20Analysis.pdf>
- Haq, M. U. (1995). *Reflections on Human Development: How the focus of development economics shifted from national income accounting to people-centred policies, told by one of the chief architects of the new paradigm*. Oxford University Press.  
[https://books.google.co.id/books?id=cXU8DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=cXU8DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)
- Hardiana, R. D., Tanuatmodjo, H., & Kurniati, F. (2020). Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 8(2), 197–210.  
<https://doi.org/10.17509/jpak.v8i2.25757>
- Harrod, R. F. (1939). An Essay in Dynamic Theory. *The Economic Journal*, 49(193), 14. <https://doi.org/10.2307/2225181>

- Haryanto, J. (2017). Analisis Perbandingan Peta Kemampuan Keuangan Daerah Penghasil SDA dan Non-SDA di Era Desentralisasi Fiskal Studi Kasus: Penggunaan Metode .... *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Query date: 2024-09-26 19:39:45. <https://scholar.archive.org/work/aacrxa3o2jbzccw5dhbsrbddp4/access/wayback/http://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/download/821/563>
- Haryanto, J. (2018). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus: Provinsi Banten Tahu 2011-2015). *Inovasi*, Query date: 2024-09-26 19:30:00. <https://doi.org/10.33626/inovasi.v15i1.22>
- Hasan, M., Dinar, M., Rijal, S., Rahmatullah, Inanna, & Arisah, N. (2020). *Sejarah Pemikiran Ekonomi. Media Sains Indonesia*. <https://eprints.unm.ac.id/28744/1/Buku%20Digital%20-%20Sejarah%20Pemikiran%20Ekonomi.pdf>
- Hasan, P. P. (2014). Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah: Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Wacana Kinerja*, 17(2), 20–40.
- Hayes, A. F. (2013). *Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach*. Guilford Press.
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115–135. <https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8>

- Hiktaop, K., Ulita, A. S., Meilvidiri, W., Herdjiono, M. V. I., & Hayon, P. P. (2020). Influence of Fiscal Decentralization on the Economic Growth of Public Welfare and Poverty Between Regions of Province of Papua. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 473(1), 1–7. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/473/1/012030>
- Hong Vo, D., Nguyen, T., Ha, D. T.-T., & Tran, N. P. (2019). The Disparity of Revenue and Expenditure among Subnational Governments in Vietnam. *Emerging Markets Finance and Trade*, 57(1), 163–174. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1605896>
- Hong Vo, D., Nguyen, T., Ha, D. T.-T., & Tran, N. P. (2021). The Disparity of Revenue and Expenditure among Subnational Governments in Vietnam. *Emerging Markets Finance and Trade*, 57(1), 163–174. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1605896>
- Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. R. (2008). Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit. *The Electric Journal of Business Research Methods*, 6(1), 53–60.
- Hoyle, R. H. (2012). *Handbook of Structural Equation Modeling*. The Guilford Press. [https://www.researchgate.net/publication/361861039\\_Handbook\\_of\\_Structural\\_Equation\\_Modeling](https://www.researchgate.net/publication/361861039_Handbook_of_Structural_Equation_Modeling)
- Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation*

*Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 6(1), 1–55.

<https://doi.org/10.1080/10705519909540118>

Idrus, M. S. (2013). *Nonparametrik Statistik Untuk Penelitian Bidang Manajemen*.

Zifatama Publisher. [https://www.researchgate.net/profile/Priyono-Priyono-4/publication/304748800\\_BUKU\\_MULTIVARIATE\\_DATA\\_ANALISIS\\_DAN\\_NONPARAMETRIK\\_STATISTIK\\_UNTUK\\_PENELITIAN\\_BIDANG\\_MANAJEMEN/links/5779686908ae4645d611f0a2/BUKU-](https://www.researchgate.net/profile/Priyono-Priyono-4/publication/304748800_BUKU_MULTIVARIATE_DATA_ANALISIS_DAN_NONPARAMETRIK_STATISTIK_UNTUK_PENELITIAN_BIDANG_MANAJEMEN/links/5779686908ae4645d611f0a2/BUKU-MULTIVARIATE-DATA-ANALISIS-DAN-NONPARAMETRIK-STATISTIK-UNTUK-PENELITIAN-BIDANG-MANAJEMEN.pdf)

[MULTIVARIATE-DATA-ANALISIS-DAN-NONPARAMETRIK-](https://www.researchgate.net/profile/Priyono-Priyono-4/publication/304748800_BUKU_MULTIVARIATE_DATA_ANALISIS_DAN_NONPARAMETRIK_STATISTIK_UNTUK_PENELITIAN_BIDANG_MANAJEMEN/links/5779686908ae4645d611f0a2/BUKU-MULTIVARIATE-DATA-ANALISIS-DAN-NONPARAMETRIK-STATISTIK-UNTUK-PENELITIAN-BIDANG-MANAJEMEN.pdf)

[STATISTIK-UNTUK-PENELITIAN-BIDANG-MANAJEMEN.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Priyono-Priyono-4/publication/304748800_BUKU_MULTIVARIATE_DATA_ANALISIS_DAN_NONPARAMETRIK_STATISTIK_UNTUK_PENELITIAN_BIDANG_MANAJEMEN/links/5779686908ae4645d611f0a2/BUKU-MULTIVARIATE-DATA-ANALISIS-DAN-NONPARAMETRIK-STATISTIK-UNTUK-PENELITIAN-BIDANG-MANAJEMEN.pdf)

[STATISTIK-UNTUK-PENELITIAN-BIDANG-MANAJEMEN.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Priyono-Priyono-4/publication/304748800_BUKU_MULTIVARIATE_DATA_ANALISIS_DAN_NONPARAMETRIK_STATISTIK_UNTUK_PENELITIAN_BIDANG_MANAJEMEN/links/5779686908ae4645d611f0a2/BUKU-MULTIVARIATE-DATA-ANALISIS-DAN-NONPARAMETRIK-STATISTIK-UNTUK-PENELITIAN-BIDANG-MANAJEMEN.pdf)

Imi, A. (2005). Decentralization and Economic Growth Revisited: An Empirical

Note. *Journal of Urban Economics*, 57(3), 449–461.

<https://doi.org/10.1016/j.jue.2004.12.007>

Indonesia, P. P. (2009). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang*

*Kesejahteraan Sosial*. [https://peraturan.bpk.go.id/Details/38601/uu-no-11-](https://peraturan.bpk.go.id/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009)

[tahun-2009](https://peraturan.bpk.go.id/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009)

Indonesia, P. P. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang*

*Pemerintahan Daerah*. [https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-](https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014)

[23-tahun-2014](https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014)

James, L. R., Mulaik, S. A., & Brett, J. M. (2006). A Tale of Two Methods.

*Organizational Research Methods*, 9(2), 233–244.

<https://doi.org/10.1177/1094428105285144>

- Jin, J., & Zou, H. (2005). Fiscal Decentralization, Revenue and Expenditure Assignments, and Growth in China. *Journal of Asian Economics*, 16(6), 1047–1064. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2005.10.006>
- Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. *Political Science Quarterly*, 51(4), 1–190. <https://doi.org/10.2307/2143949>
- Khakim, L., Hermawan, I., Solechan, A., & Ps, V. T. (2011). Potensi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 12(2), 281–296. <https://doi.org/10.23917/jep.v12i2.199>
- Khamdana, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, 2008 – 2012. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 1(1), 23–38. <https://doi.org/10.33105/itrev.v1i1.59>
- Khan, G. F., Sarstedt, M., Shiau, W.-L., Hair, J. F., Ringle, C. M., & Fritze, M. P. (2019). Methodological research on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): An analysis based on social network approaches. *Internet Research*, 29(3), 407–429. <https://doi.org/10.1108/IntR-12-2017-0509>
- Kharisma, B. (2013). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 14(2), 101–119.
- Kharisma, B., Hanifah, H., & Wardhana, A. (2020). Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal*

- Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 23(2), 179. <https://doi.org/10.31845/jwk.v23i2.666>
- Kline, R. B. (2016). *Principles and Practice of Structural Equation Modeling* (4th ed.). The Guilford Press. <https://dl.icdst.org/pdfs/files4/befc0f8521c770249dd18726a917cf90.pdf>
- Klugman, J., Rodríguez, F., & Choi, H.-J. (2011). The HDI 2010: New Controversies, Old Critiques. *The Journal of Economic Inequality*, 9(2), 249–288. <https://doi.org/10.1007/s10888-011-9178-z>
- Kothari, C. R. (1990). *Research Methodology*. New Age International. <http://dl.saintgits.org/jspui/bitstream/123456789/1133/1/Research%20Methodology%20C%20R%20Kothari%20%28Eng%29%201.81%20MB.pdf#>
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga.
- Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1–28.
- Lewis, B. D. (2017). Local government spending and service delivery in Indonesia: The perverse effects of substantial fiscal resources. *Regional Studies*, 51(11), 1695–1707. <https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1216957>
- Lin, J. Y., & Liu, Z. (2000). Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. *Economic Development and Cultural Change*, 49(1), 1–21. <https://doi.org/doi:10.1086/452488>
- Lindaman, K., & Thurmaier, K. (2002). Beyond Efficiency and Economy: An Examination of Basic Needs and Fiscal Decentralization. *Economic*

*Development and Cultural Change*, 50(4), 915–934.  
<https://doi.org/10.1086/342760>

Little, R., & Rubin, D. (2019). *Statistical Analysis with Missing Data, Third Edition* (3rd ed.). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119482260>

Litvack, J., Ahmad, J., & Bird, R. (1998). *Rethinking Decentralization in Developing Countries*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/0-8213-4350-5>

Lucas, R. E. (1988). On The Mechanics of Economics Development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3–42. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(88\)90168-7](https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7)

MacCallum, R. C., Roznowski, M., & Necowitz, L. B. (1992). Model Modifications in Covariance Structure Analysis: The Problem of Capitalization on Chance. *Psychological Bulletin*, 111(3), 490–504.  
<https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033-2909.111.3.490>

MacKinnon, D. P. (2008). *Introduction to Statistical Mediation Analysis*. Lawrence Erlbaum Associates. <https://doi.org/10.4324/9780203809556>

Mahri, A. J. W., Cupian, Arif, M. N. R. A., Arundina, T., Widiastuti, T., Mubarak, F., Fajri, M., Azizon, & Nurasyiah, A. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (1 ed.). Departemen Keuangan dan Ekonomi Syariah Bank Indonesia. <https://kneks.go.id/storage/upload/1627870706-Buku-Ekonomi-Pembangunan-Islam.pdf>

Mamuki, E., Erlansyah, & Pomolango, R. (2023). Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Tangkap di Desa Bubaa Kecamatan Paguyaman Pantai

- Kabupaten Boalemo. *Akulturası: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, 11(2), 476–486. <https://doi.org/10.35800/akulturası.v11i2.51282>
- Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi* (6 ed.). Erlangga. <https://books.google.co.id/books?id=RcXYdVdz1UAC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Mankiw, N. G. (2010). *Macroeconomics* (7. ed). Worth Publisher.
- Marcoulides, G. A., & Hershberger, S. L. (1997). *Multivariate Statistical Methods: A First Course*. Lawrence Earlbaum Associates. [https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781317778554\\_A24446861/preview-9781317778554\\_A24446861.pdf](https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781317778554_A24446861/preview-9781317778554_A24446861.pdf)
- Marsh, H. W., Hau, K.-T., & Wen, Z. (2004). In Search of Golden Rules: Comment on Hypothesis-Testing Approaches to Setting Cutoff Values for Fit Indexes and Dangers in Overgeneralizing Hu and Bentler's (1999) Findings. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 11(3), 320–341. [https://doi.org/10.1207/s15328007sem1103\\_2](https://doi.org/10.1207/s15328007sem1103_2)
- Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2003). Fiscal Decentralization and Economic Growth. *World Development*, 31(9), 1597–1616. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00109-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00109-8)
- McNeill, D. (2007). Human Development: The Power of the Idea. *Journal of Human Development*, 8(1), 5–22. <https://doi.org/10.1080/14649880601101366>
- Merta, I. B. A. A., Utama, M. S., Budhi, M. K. S., & Yasa, I. N. M. (2016). Impact of Government Expenditure, Human Capital and Regional Economic

- Development Performance on People Welfare in Bali Province, Indonesia. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 7(12), 85–93.
- Muchtolifah. (2010). *Ekonomi Makro*. Unesa University Press. [http://eprints.upnjatim.ac.id/3029/1/BUKU\\_makro\\_ekonomi.pdf](http://eprints.upnjatim.ac.id/3029/1/BUKU_makro_ekonomi.pdf)
- Mulyaningsih. (2019). *Pembangunan Ekonomi*. CV Kimfa Mandiri. <https://repository.uniga.ac.id/file/dosen/2001817809.pdf>
- Muryawan, S. M., & Sukarsa, M. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(2), 229–252.
- Musgrave, R. A. (1959). The Theory of Public Finance. *The Economic Journal*, 69(276), 766–770. <https://doi.org/10.2307/2227672>
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5. ed.). McGraw-Hill. [https://desmarais-tremblay.com/Resources/Musgrave%20Richard%20A.%20and%20Musgrave%20Peggy%20B.%201989%20%281973%29%20Public%20Finance%20in%20Theory%20and%20Practice\\_5th%20ed.pdf#page=24.19](https://desmarais-tremblay.com/Resources/Musgrave%20Richard%20A.%20and%20Musgrave%20Peggy%20B.%201989%20%281973%29%20Public%20Finance%20in%20Theory%20and%20Practice_5th%20ed.pdf#page=24.19)
- Neuman, W. L. (2002). [Rev. of *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, oleh Y. K. Djamba]. *American Sociological Association*, 30(3), 380–381. <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Neuman, W. L. (2017). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson.

<https://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/24325/1/48.W.%20Lawrence%20Neuman.pdf>

Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.  
<https://archive.org/details/fiscalfederalism0000oate/page/n7/mode/2up>

Oates, W. E. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal*, 46(2), 237–243. <https://doi.org/10.1086/NTJ41789013>

Oates, W. E. (1999a). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149.

Oates, W. E. (1999b). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149. <https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>

Oates, W. E. (2005). Toward A Second-Generation Theory of Fiscal Federalism. *International Tax and Public Finance*, 12(4), 349–373.  
<https://doi.org/10.1007/s10797-005-1619-9>

Office, I. L. (2019). *World Employment and Social Outlook: Trends 2019*. International Labour Organisation (ILO).  
[https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms\\_670542.pdf](https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_670542.pdf)

Petrakis, P. E. (2020). *Theoretical Approaches to Economic Growth and Development: An Interdisciplinary Perspective*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-50068-9>

Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century* (A. Goldhammer, Penerj.). The Belknap Press of Harvard University Press. <https://dowbor.org/wp-content/uploads/2014/06/14Thomas-Piketty.pdf>

- Prados de la Escosura, L. (2015). World Human Development: 1870-2007. *Review of Income and Wealth*, 61(2), 220–247. <https://doi.org/10.1111/roiw.12104>
- Pratiwi, N. P. A., & Indrajaya, I. G. B. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *Buletin Studi Ekonomi*, 24(2), 220–233. <https://doi.org/10.24843/BSE.2019.v24.i02.p05>
- Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. *Behavior Research Methods*, 40(3), 879–891. <https://doi.org/10.3758/BRM.40.3.879>
- Prud'homme, R. (1995). The Dangers of Decentralization. *World Bank Research Observer*, 10(2), 201–220. <https://doi.org/10.1093/wbro/10.2.201>
- Psycharis, Y., Zoi, M., & Iliopoulou, S. (2016). Decentralization and local government fiscal autonomy: Evidence from the Greek municipalities. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 34(2), 262–280. <https://doi.org/10.1177/0263774X15614153>
- Purba, E. F., & Simanjuntak, P. (2011). *Metode Penelitian* (2 ed.). Universitas HKBP NOMMENSEN. <https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/3586/Buku%20Metode%20Penelitian.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Rangkuti, A. N. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan*. Ciptapustaka Media.

<https://repo.uinsyahada.ac.id/951/1/Ahmad%20Nizar%20Rangkuti%20-%202016%20-%20Metode%20Penelitian%20Pendidikan%20.pdf>

Ravallion, M. (2016). *The Economics of Poverty: History, Measurement, and Policy*. Oxford university press.

<https://biblioteca.hegoa.ehu.es/downloads/21582/%2Fsystem%2Fpdf%2F4729%2FM-7142.pdf>

Raykov, T. (1997). Estimation of Composite Reliability for Congeneric Measures.

*Applied Psychological Measurement*, 21(2), 173–184.

<https://doi.org/10.1177/01466216970212006>

Retherford, R. D., & Choe, M. K. (1993). *Statistical Model For Causal Analysis*.

John Wiley & Sons.

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Z5NdR0ttM5cC&oi=fnd&pg=PR7&dq=statistical+model+for+causal+analysis&ots=hO0\\_FVgnNw&sig=rDDvNGHhM27wGPq8WeJyb3WajlI&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Z5NdR0ttM5cC&oi=fnd&pg=PR7&dq=statistical+model+for+causal+analysis&ots=hO0_FVgnNw&sig=rDDvNGHhM27wGPq8WeJyb3WajlI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Rizqi, K. F., Nuris, S. A., & Hayat, A. (2024). Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Jawa Barat Berbasis Kebijakan Desentralisasi Fiskal. *Prestise:*

*Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi dan Bisnis*, 4(1),

64–90.

Rodríguez-Pose, A., & Ezcurra, R. (2010). Does decentralization matter for

regional disparities? A cross-country analysis. *Journal of Economic*

*Geography*, 10(5), 619–644. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbp049>

- Rodríguez-Pose, A., & Ezcurra, R. (2011). Is fiscal decentralization harmful for economic growth? Evidence from the OECD countries. *Journal of Economic Geography*, *11*(4), 619–643. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbq025>
- Rodríguez-Pose, A., & Krøijer, A. (2009). Fiscal Decentralization and Economic Growth in Central and Eastern Europe. *Growth and Change*, *40*(3), 387–417. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2257.2009.00488.x>
- Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. *Journal of Political Economy*, *94*(5), 1002–1037. <https://doi.org/10.1086/261420>
- Rostow, W. W. (1959). The Stages of Economic Growth. *The Economic History Review*, *12*(1), 1–16. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.1959.tb01829.x>
- Samimi, A. J., Petanlar, S. K., Haddad, G. K., & Alizadeh, M. (2010). Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Nonlinear Model for Provinces of Iran. *Iranian Economic Review*, *15*(26), 126–133. <https://doi.org/10.22059/IER.2010.32702>
- Sandjaja, F. R., Nafisa, F., & Manurung, I. N. (2020). The Impact of Fiscal Decentralization on Welfare in Selected Provinces in Java Island. *Jurnal Bina Praja*, *12*(1), 21–31. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.21-31>
- Saputra, B. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Borneo Administrator*, *9*(1), 96–111. <https://doi.org/10.24258/jba.v9i1.100>
- Saputra, B., & Mahmudi. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, *16*(2), 185–199.

- Saragih, J. (2003). *Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi*.  
<https://www.semanticscholar.org/paper/a817e0f2eccc6a4716800d21608b6a7cf65460d1>
- Sarwono, J. (2011). Mengenal Path Analysis: Sejarah, Pengertian dan Aplikasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, 11(2), 285–296.
- Sasana, H. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18(1), 46–58.
- Saud, I. M., Asterina, E., & Trisha, G. F. (2020). Factors Affecting Capital Expenditure Allocation: Empirical Evidence from Regency/City Government in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 21(2), 289–311. <https://doi.org/10.18196/jai.2102150>
- Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2010). *A beginner's guide to structural equation modeling* (3rd ed.). Routledge.  
[https://www.researchgate.net/publication/362079746\\_A\\_beginner's\\_Guide\\_to\\_Structural\\_Equation\\_Modeling](https://www.researchgate.net/publication/362079746_A_beginner's_Guide_to_Structural_Equation_Modeling)
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business: A Skill-Building Approach* (7. ed.). John Wiley & Sons.  
<https://library.ucyp.edu.my/wp-content/uploads/2024/01/Research-methods-for-business-A-skill-building-approach.pdf>
- Shapiro, H., & Oates, W. E. (1972). Fiscal Federalism. *The Journal of Finance*, 27(5), 1206. <https://doi.org/10.2307/2978885>

- Sihombing, R. S. T., Kartika, A. T., Sitompul, Y. S., & Yoseph Anugerah, A. R. (2024). Implementasi Desentralisasi Fiskal Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 19(1), 81–96. <https://doi.org/10.25105/jipak.v19i1.18658>
- Simanjuntak, K. M. (2015a). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 07(02), 111–130. <https://doi.org/10.21787/JBP.07.2015.111-130>
- Simanjuntak, K. M. (2015b). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7(Query date: 2024-09-26 19:30:00), 111–130. <https://doi.org/10.21787/JBP.07.2015.111-130>
- Siregar, B., & Badrudin, R. (2019). The Evaluation of Fiscal Decentralization in Indonesia Based on the Degree of Regional Autonomy. *Journal of Reviews on Global Economics*, 8, 611–624. <https://doi.org/10.6000/1929-7092.2019.08.53>
- Siregar, I. G. (2022). Pengaruh DAU, DAK, PAD dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal. *Dynamic Management Journal*, 6(2), 175–192. <https://doi.org/10.31000/dmj.v6i2.7540>
- Smoke, P. (2001). *Fiscal Decentralization in Developing Countries: A Review of Current Concepts and Parctice*. United Nations Research Institute fo Sosial Development. <https://www.files.ethz.ch/isn/45958/2.pdf>

- Sobel, M. E. (1982). Asymptotic Confidence Intervals for Indirect Effects in Structural Equation Models. *Sociological Methodology*, 13, 290–312.  
<https://doi.org/10.2307/270723>
- Sodiq, A. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 380–405.  
<https://doi.org/10.21043/equilibrium.v3i2.1268>
- Soejoto, A., Subroto, W. T., & Suyanto. (2015). Fiscal Decentralization Policy in Promoting Indonesia Human Development. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(3), 763–771.
- Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65.  
<https://doi.org/10.2307/1884513>
- Sörbom, D. (1989). Model Modification. *Psychometrika*, 54(3), 371–384.  
<https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/BF02294623>
- Statistik, B. P. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2018-2022*. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.
- Streiner, D. L. (2005). Finding Our Way: An Introduction to Path Analysis. *The Canadian Journal of Psychiatry*, 50(2), 115–122.  
<https://doi.org/10.1177/070674370505000207>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.

[https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb\\_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43\\_1652079047.pdf](https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf)

- Sukirno, S. (2015). *Makroekonomi Teori Pengantar* (Ketiga). Rajawali Pers.
- Sukmana, O. (2017). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Sosial Politik*, 2(1), 103–122.  
<https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>
- Suwanda, D. (2020). Decentralization of Fiscal Asymmetric for Community Well-Being: Evidence from Aceh Province, Indonesia. *Journal of Adv Research in Dynamical & Control System*, 12(06), 2868–2881.  
<https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201249>
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). *Using Multivariate Statistics* (7th ed.). Pearson.  
<https://www.pearsonhighered.com/assets/preface/0/1/3/4/0134790545.pdf>
- Tanaka, J. S., & Huba, G. J. (1985). A fit index for covariance structure models under arbitrary GLS estimation. *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, 38(2), 197–201. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8317.1985.tb00834.x>
- Thornton, J. (2007). Fiscal Decentralization and Economic Growth Reconsidered. *Journal of Urban Economics*, 61(1), 64–70.  
<https://doi.org/10.1016/j.jue.2006.06.001>
- Tiebout, C. M. (1956). A Pure Theory of Local Expenditures. *The Journal of Political Economy*, 64(5), 416–424.

- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (Thirteenth edition). Pearson Education Limited.  
[https://students.aiu.edu/submissions/profiles/resources/onlineBook/F5v9e6\\_Economic%20Development-2020.pdf](https://students.aiu.edu/submissions/profiles/resources/onlineBook/F5v9e6_Economic%20Development-2020.pdf)
- Tucker, L. R., & Lewis, C. (1973). A Reliability Coefficient for Maximum Likelihood Factor Analysis. *Psychometrika*, 38(1), 1–10.  
<https://doi.org/10.1007/BF02291170>
- Tuckman, B. W. (1994). *Conducting Educational Research* (4th ed.). Harcourt Brace College Publishers.  
[https://archive.org/details/conductingeducat0000tuck\\_w6p9/mode/2up](https://archive.org/details/conductingeducat0000tuck_w6p9/mode/2up)
- United Nations Development Programme (UNDP). (1990). *Human development report 1990*. Oxford University Press.  
<https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1990encompletenostats.pdf>
- United Nations Development Programme (UNDP). (1994). *Human Development Report 1994*. Oxford University Press.  
<https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1994encompletenostats.pdf>
- Webley, P., Rogers, P., Coups, E., & Haddock, G. (1997). *It could be UK! Predictors and correlates of participation in the National Lottery* (In I. Q. Pardo (ed.)). The 22nd IAREP Colloquium.  
[https://www.researchgate.net/publication/336409148\\_It\\_could\\_be\\_UK\\_Predictors\\_and\\_correlates\\_of\\_participation\\_in\\_the\\_National\\_Lottery\\_In\\_I](https://www.researchgate.net/publication/336409148_It_could_be_UK_Predictors_and_correlates_of_participation_in_the_National_Lottery_In_I)

Quintanilla\_Pardo\_Ed\_The\_22nd\_IAREP\_Colloquium\_pp\_173-  
183\_Promolibro\_Valencia\_Spain

- Wibisono, D. R., Damayanthi, G. A. A. R., Widiatmoko, N. F., & Cristiano, M. (2024). Perbandingan Metode Peramalan Berbasis Pola Tren Musiman untuk Prediksi Permintaan Obat dengan Model Holt-Winter's Exponential Smoothing dan ARIMA. *TALENDA*, 7(1), 107–117. <https://doi.org/10.32734/ee.v7i1.2177>
- Wibowo, E. A., & Oktivalerina, A. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota: Studi Kasus Indonesia pada 2010 - 2018. *Bappenas Working Papers*, 5(1), 97–119. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.117>
- Wibowo, P. (2008). Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(1), 55–83.
- Widyastuti, A. (2012). Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009. *Economic Development Analysis Journal*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.15294/edaj.v1i2.472>
- Wijayanti, N. K. H., & Darsana, I. B. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(9), 1164–1193.

- Woller, G. M., & Phillips, K. (1998). Fiscal Decentralisation and IDC Economic Growth: An Empirical Investigation. *Journal of Development Studies*, 34(4), 139–148. <https://doi.org/10.1080/00220389808422532>
- Wright, S. (1934). The Method of Path Coefficients. *Annals of Mathematical Statistics*, 5(3), 161–215. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1214/aoms/1177732676>
- Xie, D., Zou, H., & Davoodi, H. (1999). Fiscal Decentralization and Economic Growth in the United States. *Journal of Urban Economics*, 45(2), 228–239. <https://doi.org/10.1006/juec.1998.2095>
- Yahya, & Bahtiar, H. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat Menggunakan Algoritma Naive Bayes. *Infotek : Jurnal Informatika dan Teknologi*, 4(1), 20–28. <https://doi.org/10.29408/jit.v4i1.2981>
- Zakaria, J. (2009). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Gaung Persada Press. <http://repository.umi.ac.id/853/3/Buku%20Makro%20fix.pdf>
- Zhang, T., & Zou, H. (1998). Fiscal Decentralization, Public Spending, and Economic Growth in China. *Journal of Public Economics*, 67(2), 221–240. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(97\)00057-1](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(97)00057-1)